

PERKEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN NGAWI TAHUN 2000-2013**Vivit Khasanatu Rohmah**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

E-Mail: vividkhasanah@gmail.com**Agus Trilaksana**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Era otonomi daerah yang dimulai tahun 2000 dan dimantapkan tahun 2004 memberikan kesempatan daerah untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing sesuai kebutuhan daerah. Salah satunya adalah pengembangan potensi wisata. Pariwisata juga merupakan sarana media pengenalan budaya daerah dan objek wisata alam Ngawi. Pengenalan objek wisata keluar daerah dapat menambah kunjungan wisata dan memicu adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Kabupaten Ngawi merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi wisata menarik dan layak untuk dikembangkan.

Pariwisata Ngawi sebelum adanya kebijakan otonomi daerah sudah membuka tujuh objek wisata. Dalam rangka pengembangan pariwisata Ngawi berdasarkan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Ngawi mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain; menyusun Rencana Jangka Menengah, membentuk Dinas Pariwisata tahun 2008, menyusun Rencana Strategis, menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang retribusi, membentuk Unit Pelayanan Teknis (UPT) di tempat wisata Pemandian Tawun pada tahun 2013, mencanangkan Tahun Kunjungan Wisata Ngawi 2012 (*Visit Ngawi 2012*), menyusun Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) untuk menggali potensi pariwisata, bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan wisata Pemandian Tawun, dan melaksanakan kebijakan pemerintah pusat yaitu Program Sapta Pesona. Berdasarkan kebijakan yang telah dikeluarkan pariwisata Kabupaten Ngawi semakin berkembang dengan membuka sepuluh objek wisata baru yang diikuti dengan penambahan dan pengembangan sarana prasarana objek wisata, seperti akomodasi, restoran, transportasi, fasilitas objek wisata, dan akses jalan.

Pariwisata di Kabupaten Ngawi mempunyai kontribusi terhadap peningkatan (PAD) yang berasal dari adanya pemungutan retribusi di tempat wisata. Pariwisata juga berperan penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat sekitar objek wisata. Tambahan pendapatan tersebut didapat dari hasil pembukaan kios, warung dan jasa parkir swasta dan jasa penyewaan perahu. Kegiatan pariwisata juga membawa dampak negatif, antara lain kerusakan fasilitas objek wisata, menurunnya kebersihan yang dapat menyebabkan kerugian pada pengelola dan investor.

Kata kunci : pengembangan, pariwisata, ekonomi**Abstract**

Regional autonomy era began in 2000 and strengthened in 2004 giving the opportunity to develop the potential of each area as needed area. One is the development of tourism potential. Tourism is also a means of introduction to the culture medium and the natural attraction Ngawi. The introduction of exit area attractions can add excursions and trigger an increase in revenue (PAD). Ngawi is one of the districts that have the potential for interesting and deserves to be developed, but is less widely known.

Prior to the decentralization policy Ngawi already opened seven attractions. After regional autonomy Ngawi Government formulate some policy of tourism development, among other things: preparing the Medium Term Plan (RJM), forming the Department of Tourism in 2008, prepare a Strategic Plan, compiled Regulation Ngawi about retribution, forming Service Unit technical (UPT) in the Pemandian Tawun sights in 2013, launched visit Ngawi 2012, Action Plan Heritage City (RAKP) to explore the potential of tourism, in cooperation with the private sector in tourism management of Pemandian Tawun and implement policies of central government Sapta Pesona program.

Based on the policies that have been issued Ngawi tourism is growing with the opening of ten new attractions also followed by the addition and development of infrastructure facilities and attractions around the area attractions, such as accommodation, restaurant, transport, attractions facilities, and access roads.

Tourism Ngawi it also has contributed to the increase in revenue, from the existence of fee collection at tourist spots. Procurement of fee collection comes from a show or event at tourist attractions such as shadow puppet show, music concert, a show the night market and the implementation of other performances. Tourism also plays an important role in the economic development of communities surrounding attractions. Additional revenue is derived from the opening of shops and services and private parking at the boat rental services and tourist. Tourism activities also have negative impacts, such as damage to the facility attraction, declining hygiene can cause harm to the manager and the investor.

Keywords: development, tourism, economy

A. Pendahuluan

Pariwisata bukanlah kegiatan yang baru-baru saja ada, kegiatan pariwisata sudah berkembang pada zaman Romawi berlangsung yaitu 200 SM sampai pada abad 5 M.¹ Setelah Perang Dunia II banyak negara yang mulai tertarik dengan kegiatan pariwisata yang dianggap bisa menjadi alat atau pilihan lain untuk memajukan ekonomi negara. Kegiatan pariwisata mulai diminati oleh negara-negara di Eropa, setelah menarik minat negara Eropa kegiatan pariwisata juga mulai diminati oleh negara-negara sedang berkembang yang memanfaatkan pariwisata untuk memperkenalkan daya tarik dari negara sedang berkembang dan untuk menarik penghasilan di bidang ekonomi.²

Pariwisata di Indonesia sudah berkembang sejak zaman kerajaan, hal ini ditunjukkan dengan pembangunan kolam Segaran di Trowulan, yang digunakan untuk kebutuhan rekreasi dan kebutuhan persediaan air di musim kemarau, pembangunan Tasik Ardi di Banten lama yang dibangun oleh Maulana Yusuf pada abad ke-16 untuk keperluan rekreasi, irigasi dan persediaan air minum. Pembangunan Taman Narmada pada abad ke-17 yang dibangun untuk tempat peristirahatan raja-raja Lombok. Tempat wisata yang dibangun masa kerajaan lainnya adalah Gunongan yang ada di Aceh, Gunongan dibangun masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) yang ditujukan untuk tempat istirahat dan bersantai bagi permaisurinya.³ Pada dasarnya kegiatan pariwisata yang bersifat rekreatif masih terbatas dilakukan oleh kalangan bangsawan, sama seperti kegiatan pariwisata yang dilakukan di kerajaan Inggris masa pemerintahan Ratu Elisabeth I. Pariwisata dari kalangan bangsawan disebut juga pariwisata *aristocrat* atau *aristocratic tourism*, hal ini terjadi karena dahulu memanfaatkan waktu senggang untuk rekreasi belum terlalu dikenal.⁴

Perkembangan pariwisata Indonesia pada umumnya cukup lambat, hal ini dikarenakan banyaknya hambatan yang terjadi dari dalam dan luar negeri, contohnya terjadi pemberontakan yang bersifat kedaerahan yang menyebabkan berbagai konflik politik, sosial, dan ekonomi masyarakat. Peristiwa tersebut serta merta diikuti dengan kenaikan harga barang-barang yang mengakibatkan lesunya bidang pariwisata Indonesia, tidak berhenti sampai disitu, pariwisata dunia juga sedang mengalami kemunduran jumlah wisatawan yang terjadi karena adanya krisis ekonomi dunia.

Pelaksanaan kegiatan pariwisata didukung oleh beberapa industri lain seperti industri perhubungan, transportasi, pertanian, ekonomi, dan perhotelan. Industri pariwisata juga didukung oleh kebijakan pariwisata yang

dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pariwisata di Indonesia. Kebijakan pariwisata yang dikeluarkan pemerintah salah satunya adalah Keputusan Presiden No 15 tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata yang dikeluarkan pada 9 Maret 1983. Keputusan Presiden tersebut menerapkan bebas visa pada wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia,⁵ dengan demikian peminatan pariwisata Indonesia semakin meningkat, terutama dari wisatawan asing.

Kegiatan pariwisata memiliki beberapa dampak bagi suatu daerah. Dampak pariwisata untuk daerah antara lain dampak ekonomi, dampak budaya, dampak sosial, dan dampak lingkungan. Dampak ekonomi kegiatan industri pariwisata antara lain berupa pendapatan dari penukaran mata uang asing, pendapatan berupa pajak, sumber mata pencaharian, penyerapan tenaga kerja, *multiplier effect*, pemanfaatan fasilitas pariwisata bersama dengan masyarakat lokal, dan sebagainya.⁶

Pariwisata merupakan salah satu sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 6 menyebutkan sumber-sumber PAD antara lain; a) pajak daerah, b) retribusi daerah, c) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁷ Pariwisata merupakan bagian dari retribusi daerah, yang masuk dalam retribusi jasa usaha.⁸

Semula pemerintahan pusat adalah pemegang penuh semua pemerintahan dari pusat sampai daerah sehingga disebut pemerintahan sentralistik, karena berpusat di ibu kota. Posisi pemerintah daerah masa itu adalah sebagai pelaksana kebijakan dari pusat. Setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto, Presiden B. J. Habibie menerbitkan sebuah Undang-Undang yang memberi kewenangan pada daerah untuk mengurus sendiri daerahnya agar dapat lebih memaksimalkan potensi daerah dengan menurunkan keputusan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Keberadaan Undang-Undang tentang otonomi daerah tersebut membuat Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan aset daerah berupa pariwisata yang ditetapkan melalui penarikan retribusi daerah. Kabupaten Ngawi sebagai salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur juga mulai menerapkan otonomi daerah. Adanya Undang-Undang No. 5 tahun 1999 membuat pemerintah daerah dapat lebih memaksimalkan pengembangan potensi wisata dengan menerbitkan beberapa Perda yang terkait dengan penarikan retribusi untuk mengembangkan objek wisata di Kabupaten Ngawi.

¹ James J Spillane. 1994. *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius halaman 27

² *Ibid.*, halaman 28

³ H. Kodhyat. 1996. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Grasindo halaman 16-17

⁴ Spillane *op.cit*, halaman 17

⁵ Kodhyat. *op.cit*, halaman 90

⁶ I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi halaman 184

⁷ Nurlan Darise. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gorontalo: Indeks halaman 37

⁸ *Ibid.*, halaman 74

Kegiatan pariwisata bukan semata-mata digunakan untuk kegiatan menjernihkan pikiran, kegiatan bersenang-senang maupun kegiatan untuk menimbun pundi-pundi uang atau kemajuan ekonomi, kegiatan pariwisata juga dapat digunakan untuk memperkenalkan budaya daerah-daerah Indonesia, seperti yang termaktub dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 1969, Bab II Pasal 2 tentang Tujuan Pengembangan Pariwisata.⁹ Berdasar instruksi tersebut pariwisata di Kabupaten Ngawi dapat digunakan untuk memperkenalkan dan melestarikan kebudayaan tradisional yang belum diketahui kalangan luas, sebagai sarana pendidikan, dan merupakan salah satu sumber PAD. Perkembangan objek pariwisata menghasilkan pekerjaan atau peluang kerja baru untuk masyarakat sekitar tempat wisata.

Pariwisata Ngawi dilihat dari jenis objek wisatanya menyajikan objek wisata budaya dan objek wisata alam. Objek wisata di Kabupaten Ngawi cukup banyak, seperti Museum Trinil, Pemandian Tawun, Benteng Van Den Bosch atau Benteng Pendem, Monumen Soerjo, Waduk Pondok, Waduk Sangiran, Air Terjun Srambang, Air terjun Pengantin, Perkebunan Teh Jamus, dan Pesanggrahan Srigati,¹⁰ objek pariwisata ini tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi, namun keberadaan objek pariwisata ini kurang dikenal oleh masyarakat.

Objek wisata Ngawi tidak hanya menyediakan objek-objek wisata alam, namun juga terdapat wisata budaya lokal yang masih dipegang kuat dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Tradisi budaya lokal masyarakat Ngawi terlihat dari adanya "Upacara Keduk Beji" yang diadakan di daerah Tawun untuk melestarikan adat istiadat Desa Tawun yang dapat menarik wisatawan. Tradisi yang tidak kalah menarik adalah kesenian tarian-tarian di daerah Ngawi, antara lain; Tari Orek-Orek, Tari Bedoyo Srigati, Tari Pentul Melikan, dan batik khas Ngawi.¹¹ Kegiatan pariwisata Ngawi juga didukung oleh adanya kuliner makanan khas Ngawi dan juga oleh-oleh kerajinan (*souvenir*) berupa hasil kerajinan masyarakat dari bonggol jati dan kerajinan limba jati yang merupakan hasil dari kerajinan tangan hasil olahan penduduk sekitar yang terletak di kawasan Kecamatan Mantingan yang sebagian besar daerahnya berupa hutan. Cinderamata lain yang dapat ditemukan di Kabupaten Ngawi adalah batik khas Ngawi yang memiliki motif padi atau tumbuh-tumbuhan dan hewan purba.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk menulis tentang perkembangan pariwisata Kabupaten Ngawi yang memiliki banyak potensi wisata, baik wisata

alam maupun wisata budaya. Sektor pariwisata merupakan sektor pendukung tambahan untuk menambah PAD dari sektor non migas. Setelah di keluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah membuat daerah semakin mudah untuk mengembangkan potensi daerah masing-masing untuk memajukan daerah, salah satunya adalah memajukan industri pariwisata. Menurut sepengetahuan penulis masih sedikit penulisan yang membahas tentang pariwisata regional, terutama Kabupaten Ngawi masih sedikit dilakukan penulisan yang membahas pariwisata Ngawi, sehingga penulis tertarik untuk menulis perkembangan pariwisata Kabupaten Ngawi.

Penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang perkembangan pariwisata telah pernah dilakukan antara lain oleh: I Gede Pitana dengan judul *Pengantar Ilmu Pariwisata* yang diterbitkan tahun 2009 yang berisi tentang dampak pariwisata di bidang ekonomi yang dapat membantu perkembangan ekonomi suatu daerah maupun negara dengan *multiplier effect* yang dapat dirasakan oleh penduduk sekitar tempat wisata maupun daerah.

Buku lain yaitu buku yang ditulis oleh Gamal Suwanto yang berjudul *Dasar-Dasar Pariwisata* tahun 1997 yang menjelaskan tentang industri pariwisata, bentuk-bentuk pariwisata, pariwisata sebagai kegiatan ekonomi, upaya pengembangan pariwisata dan kebijakan yang dikeluarkan daerah.

Buku karya Moch. Enoch yang berjudul *Geografi Pariwisata* tahun 1996 yang membahas tentang pariwisata dilihat dengan keadaan geografinya, kemudian buku karya H. Kodhyat yang berjudul *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia* tahun 1996, yang membahas tentang perkembangan pariwisata Indonesia masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

Buku-buku tersebut menginspirasi penulis untuk mengkaji pariwisata regional yaitu pariwisata Kabupaten Ngawi. Penulis tertarik untuk menulis perkembangan pariwisata Ngawi dan sumbangannya terhadap PAD dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Ngawi, khususnya masyarakat sekitar objek wisata. Hal yang membedakan karya ini dengan buku-buku diatas adalah; dalam buku diatas lingkup pembahasannya mencakup wilayah yang luas, yaitu Indonesia dan objek wisata yang diambil sebagai contoh adalah objek wisata di Pulau Bali yang sudah terkenal di dunia, sehingga penulis berkeinginan untuk meneliti tentang perkembangan pariwisata di tingkat regional yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat luas, seperti pariwisata di Kabupaten Ngawi. Kabupaten Ngawi mempunyai potensi wisata yang di dominasi oleh potensi wisata alam, dengan potensi wisata yang ada, penulis berkeinginan untuk menggali hubungan antara perkembangan pariwisata di daerah regional dan besarnya sumbangan pariwisata terhadap PAD.

Metode yang digunakan adalah metode sejarah penelitian sejarah, meliputi tahap heuristik untuk mendapatkan arsip, foto dan hasil wawancara. Wawancara dilaksanakan dengan mewawancarai narasumber yang *kredibel* yaitu kepala dinas pariwisata,

⁹ R.G. Soekadijo. 1995. *Anatomi Pariwisata, Memahami Pariwisata Sebagai "Systemic Linkage"*. Jakarta: Gramedia halaman 268-269

¹⁰ Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi. 2012. *Pesona Wisata Kabupaten Ngawi*. Ngawi: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

¹¹ Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga. 2013. *Buku Pariwisata dan Sejarah, Ngawi Ramah*. Ngawi: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga halaman 33-46.

kepala dinas pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Kebersihan (PUBMCK), dinas pengelola, pendapatan dan keuangan daerah (DPPKA), dan badan perencanaan dan pengembangan daerah (bappeda). Wawancara juga dilakukan dengan pelaku usaha wisata seperti pemilik warung atau kios yang berjualan di objek wisata, pemilik jasa persewaan perahu, dan pemilik jasa parkir swasta.

Sumber primer juga didapat peneliti meliputi dokumen-dokumen seperti data statistik kunjungan pariwisata di Kabupaten Ngawi dari tahun 2000-2013, peta wisata Kabupaten Ngawi, Rencana Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Ngawi, peraturan-peraturan daerah dan kebijakan pariwisata yang dikeluarkan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, dan Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP).

Tahap kedua yakni kritik, penulis hanya melakukan kritik intern, yaitu mengkaji tentang isi sumber dan kesesuaian sumber terhadap tema yang dikaji dengan cara mempelajari sumber-sumber yang telah didapat. Tahap ketiga adalah interpretasi untuk menganalisis sumber yang saling berkaitan sesuai tema penelitian dan Hasil rekonstruksi yang dihasilkan dari proses interpretasi yakni : (a) objek daerah tujuan wisata dan kebijakan pariwisata yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, (b) perkembangan pariwisata Kabupaten Ngawi, dan (c) pengaruh kegiatan pariwisata Ngawi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tahap yang terakhir adalah historiografi yang disajikan dalam bahasa yang mudah dan sesuai dengan kaidah penulisan.

B. Pembahasan

Pariwisata adalah suatu fenomena yang ditimbulkan oleh salah satu kegiatan manusia yaitu kegiatan yang disebut perjalanan atau *travel*.¹² Pariwisata dalam artian sederhana adalah suatu kegiatan melakukan perjalanan dari rumah terutama untuk maksud usaha atau bersantai.¹³ Secara etimologis, kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti seluruh, semua dan penuh, dan *wisata* berarti perjalanan. Pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan penuh, yaitu berangkat dari suatu tempat menuju dan singgah di suatu atau di beberapa tempat, dan kembali ke tempat asal semula.¹⁴ Pengertian pariwisata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi; pelancongan; *tourisme*.¹⁵

Dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1990 disebutkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di

bidang tersebut.¹⁶ Pada tahun 2009 kembali dikeluarkan Undang-Undang yang membahas tentang pariwisata. Menurut UU No 10 tahun 2009 wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.¹⁷ Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.¹⁸

Kegiatan pariwisata juga membutuhkan industri lain dalam pelaksanaannya, sehingga pariwisata berkembang menjadi sebuah industri. Industri pariwisata bukanlah industri yang berdiri sendiri, industri pariwisata adalah gabungan dari beberapa perusahaan yang bergerak dalam beberapa bidang yang berbeda, misalnya bidang jasa, perhubungan, akomodasi dan transportasi

1. Objek Daerah Tujuan Wisata Kabupaten Ngawi

Kabupaten Ngawi adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur sebelah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah.

Secara astronomis Kabupaten Ngawi terletak di 7°21' LS - 7° 31' LS dan 111° 07' BT-111° 40' BT. Secara geografis Kabupaten Ngawi berbatasan dengan :
Sebelah Utara : Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan (Provinsi Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur)

Sebelah Selatan: Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun

Sebelah Timur : Kabupaten Madiun

Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah).¹⁹

Kabupaten Ngawi secara administratif terbagi dalam 19 Kecamatan dan 217 Desa.²⁰ Kondisi topografi Kabupaten Ngawi terdiri dari pegunungan, bukit, dan dataran rendah. Kondisi topografi ini membuat Kabupaten Ngawi memiliki objek wisata alam dan wisata budaya. Kondisi pariwisata Kabupaten Ngawi dapat digambarkan dengan:

2. Kondisi Objek Daerah Tujuan Wisata Sebelum Adanya Kebijakan

Pariwisata Kabupaten Ngawi sebelum adanya kebijakan otonomi daerah telah memiliki beberapa objek wisata yang telah berdiri sejak tahun 1990an. Objek wisata Kabupaten Ngawi terdiri dari objek wisata alam dan objek wisata budaya. Objek wisata tersebut antara lain, Museum Trinil, Monumen Soeryo, Air Terjun Srambang, Pemandian Tawun, wisata religi

¹² H. Kodhyat, *op. cit.*, halaman 1

¹³ Donald, E Lunderberg, Mink H. Stavenga, M. Khrisnamoorthy. 1997. *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta : Gramedia halaman 3

¹⁴ *Ibid.*, halaman 9

¹⁵ www.kamusbesarbahasaindonesia.org diakses pada 10 April 2014 Pukul 20.08

¹⁶ Hadi Setya Tunggal. 1999. *Peraturan Perundang-Undangan Kepariwisata Indonesia*. Jakarta : Havarindo, halaman 3

¹⁷ Undang-Undang No. 10 tahun 2009 halaman 2

¹⁸ *Ibid.*, halaman 3

¹⁹ Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi. 2009. *Kabupaten Ngawi dalam Angka 2009*. Ngawi: Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik (BPS) halaman xxiii

²⁰ *Ibid.*,

Pesanggrahan Srigati, Waduk Pondok dan Waduk Sangiran.

Objek wisata budaya Kabupaten Ngawi yang tertua adalah wisata religi Alas Ketonggo. Objek wisata Alas Ketonggo, khususnya Pesanggrahan Srigati mulai ramai atau banyak dikunjungi wisatawan sekitar tahun 1990an.²¹ Banyaknya jumlah pengujung tersebut mempengaruhi masyarakat sekitar dan mendorong masyarakat sekitar untuk berpindah ke area tempat wisata dan bermukim di sekitar tempat wisata Pesanggrahan Srigati untuk berdagang. Wisata religi Alas Ketonggo berada di kawasan hutan milik Perhutani, namun dalam hal pengembangan wisata religi Alas Ketonggo dikelola oleh masyarakat sekitar yang bekerjasama dengan pihak Perhutani.

Objek wisata budaya Kabupaten Ngawi yang lain adalah Museum Trinil. Wisata Museum Trinil telah berdiri sejak tahun 1980/1981 yang dibangun dari anggaran APBD Ngawi.²² Museum Trinil ini dibangun Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi setelah tergerak oleh perjuangan masyarakat sekitar bernama Wirodihardjo yang mempunyai hobi mengoleksi tulang. Wirodihardjo menyimpan hasil temuan fosil tulang-tulang di rumahnya sejak tahun 1967, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi memutuskan untuk membuat museum mini untuk menampung fosil-fosil hasil temuan Wirodihardjo.²³

Selain Alas Ketonggo dan Museum Trinil wisata budaya Kabupaten Ngawi yang lain adalah wisata budaya tradisi Keduk Beji yang dilestarikan oleh penduduk sekitar Desa Tawun. Tradisi Keduk Beji adalah salah satu tradisi bersih desa atau *nyadran* yang dilakukan masyarakat sekitar desa Tawun untuk menghormati Ki Ageng Tawun dan Nyi Ageng Ketawang yang merupakan sesepuh desa yang dihormati. Wisata budaya Keduk Beji ini sudah diselenggarakan sejak lama, sejak Kabupaten Ngawi pertama kali terbentuk.²⁴ Keberadaan tradisi Keduk Beji membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi tertarik untuk mengembangkan wilayah Tawun dan sekitar menjadi daerah wisata. Pengembangan Tawun menjadi tempat wisata dimulai pada tahun 1988/1989. Pada tahun 1991 wisata Pemandian Tawun yang semula dikelola oleh Pemerintah Daerah dikembangkan lebih jauh dengan bekerjasama dengan pihak swasta PT. Bukit Ketawang Indah yang menandatangani perjanjian kerjasama sejak tahun 1991-2016.²⁵

Wisata budaya yang lain adalah Monumen Soeryo dibangun untuk memperingati gugurnya Gubernur pertama Jawa Timur Raden Mas A. Suryo. Gubernur Suryo gugur di Desa Mantingan Kabupaten Ngawi setelah dibunuh oleh anggota pemberontakan PKI 1948. Pada tahun 1974/1975 di tempat terbunuhnya Gubernur Soeryo kemudian dibangun monumen, yang pada tahun 1975 diresmikan oleh Mayjend TNI-AD Witarmin PANGDAM VIII Brawijaya pada tanggal 28 Oktober 1975.

Kabupaten Ngawi juga memiliki wisata alam yang menarik, salah satunya adalah wisata Air Terjun Srambang yang telah dikembangkan menjadi tempat wisata sejak tahun 1995. Wisata Air Terjun Srambang berada di wilayah kepemilikan Perhutani. Wisata Air Terjun Srambang merupakan pilihan wisata alam yang menarik karena memiliki keindahan pemandangan alam air terjun yang dikelilingi oleh pohon pinus dan pohon cemara. Keindahan Air Terjun Srambang ditambah dengan konsep wisata alami yang dimiliki oleh Air Terjun Srambang. Wisata Air Terjun Srambang merupakan salah satu wisata favorit masyarakat Ngawi dan sekitarnya pada tahun 1995-1999. Pengunjung wisata ini terbilang cukup ramai karena keindahan alam yang disajikan dan konsep alami yang tetap dijaga.²⁶

Wisata alam Kabupaten Ngawi terus dikembangkan dengan dibangunnya Waduk Pondok dan Waduk Sangiran oleh DAS Solo untuk memenuhi kebutuhan irigasi masyarakat sekitar waduk. Waduk Pondok dan Waduk Sangiran dibangun pada tahun 1998.²⁷ Keindahan alam sekitar Waduk Pondok dan Waduk Sangiran menarik minat masyarakat untuk mengunjungi Waduk Pondok dan Waduk Sangiran sebagai salah satu wisata alam Kabupaten Ngawi. Selain sebagai tempat wisata, keberadaan Waduk Pondok dan Waduk Sangiran digunakan sebagai tempat mengembangbiakkan ikan. Adanya keramba ikan membuat wisata ini semakin diminati oleh pengunjung, terlebih bagi pengunjung yang gemar memancing. Wisata Waduk Pondok dan Waduk Sangiran dikelola oleh DAS Solo sejak dibuka menjadi tempat wisata di Kabupaten Ngawi, kemudian tahun 1999 kepengurusan Waduk Pondok dan Waduk Sangiran diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.²⁸

4. Kebijakan Pariwisata Kabupaten Ngawi

. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah dimulai dengan penetapan Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menciptakan pelaksanaan otonomi daerah agar daerah dapat lebih mudah mengambil keputusan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah. Kedua Undang-Undang tersebut kemudian diperbaiki menjadi

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Sri di Pesanggrahan Srigati tanggal 2 Juli 2014 pukul 12.00.

²² Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi. 2013. *Buku Pariwisata dan Sejarah Ngawi Ramah*. Ngawi: Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Dinas Pariwisata halaman 34

²³ *Ibid.*, halaman 16

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Supomo di area wisata Tawun tanggal 16 Juli 2014

²⁵ Surat perjanjian kerjasama pembangunan pemugaran taman rekreasi Tawun nomor 05/KTR/1991 tanggal 18 Desember 1991

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Siman di area wisata Air Terjun Srambang tanggal 11 Juli 2014 pukul 13.30

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ponco Sudarmanto di desa dero tanggal 11 Juli 2014 pukul 16.00

²⁸ *Ibid.*,

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Setelah dikeluarkan Undang-Undang tentang otonomi daerah, pemerintahan daerah lebih leluasa untuk mengambil keputusan yang berkaitan tentang pembangunan dan pengembangan daerah.

Berdasarkan kewenangan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur juga berusaha untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan pembangunan seperti Renstra daerah yang memuat rencana-rencana yang dibutuhkan untuk memaksimalkan pembangunan dan memaksimalkan pemanfaatan potensi daerah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 26 tahun 2000 tentang Pola Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, peraturan ini memuat tentang pedoman pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk lebih mengembangkan Jawa Timur. Peraturan daerah tersebut disusul dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 2 tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2001-2005, dalam peraturan tersebut dimuat pedoman teknis pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur. Pembangunan dimaksudkan untuk mengupayakan peningkatan pendapatan rakyat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.²⁹

Kebijakan tentang program pembangunan daerah disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 19 tahun 2001 tentang Rencana Strategis Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005. Peraturan ini memuat tentang penjabaran lanjutan dari Peraturan Daerah No. 2 tahun 2001. Program yang dirancang untuk mengembangkan pariwisata antara lain dengan melakukan kegiatan mengintegrasikan kegiatan pengelolaan usaha pariwisata antar kabupaten/kota antara provinsi dan antar negara, intensifikasi dan ekstensifikasi promosi pariwisata, pengkajian dan pelatihan sumber daya manusia pariwisata, dan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan. Pemerintah hendaknya dapat meningkatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, kabupaten, desa dan warga sekitar tempat wisata untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan kebijakan pariwisata.³⁰

Sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 yang membahas tentang Otonomi Daerah yang didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, semua daerah kabupaten dapat membuat keputusan untuk memaksimalkan potensi daerahnya dengan lebih baik. Kebijakan otonomi daerah kemudian diganti dan disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan kebijakan otonomi daerah Pemerintah

Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi berhak mengeluarkan keputusan, namun keputusan tersebut harus selaras dengan kebijakan yang telah diputuskan atau dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. Kebijakan otonomi daerah mendorong Kabupaten Ngawi untuk lebih mengoptimalkan pengembangan potensi wisata Kabupaten Ngawi.

Langkah pertama yang diambil dalam kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi adalah dengan mengeluarkan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur No. 15 tahun 2000 yang membahas tentang pembentukan Dinas Pariwisata beserta tugas dan wewenangnya. Peraturan ini merupakan penyesuaian terhadap Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No.: 56/MI.PAN/2/2000 tentang Pembentukan/Pengintegrasian Instansi Vertikal Departemen menjadi Dinas tanggal 4 Februari 2000, untuk perubahan dan pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang sebelum dikeluarkan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi, diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 9 tahun 1995. Mengacu pada keputusan tersebut pada tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Ngawi mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 44 tahun 2008 yang membahas tentang tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga tingkat kabupaten. Pembentukan Dinas Pariwisata secara mandiri terbilang sedikit terlambat, hal tersebut terkait dengan penyesuaian yang dilakukan pemerintah dengan beralihnya pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Kewenangan otonomi daerah membuat Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Ngawi merancang beberapa peraturan atau kebijakan yang telah diatur untuk melaksanakan pembangunan, salah satunya adalah menyusun Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi pada tahun 2006-2010, rencana ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No 2 tahun 2006. Peraturan ini adalah peraturan pengembangan tingkat kabupaten pertama yang disusun, karena selama tahun 2000-2006 dilakukan penyesuaian yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, untuk sementara pihak Kabupaten Ngawi mengikuti keputusan dari pusat dan daerah tingkat provinsi.³¹ Peraturan daerah Kabupaten Ngawi tahun 2006-2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah berisi rencana-rencana pengembangan dan pembangunan Kabupaten Ngawi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata, pembangunan sarana prasarana transportasi, dan peningkatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan di bidang lain.

Pembangunan tahun 2006-2010 kemudian dilanjutkan dengan pembangunan tahun 2010-2015 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 17 tahun 2010. Pada periode ini pemerintah juga berupaya untuk melakukan pemugaran dan

²⁹ Lampiran Peraturan Pemerintah Daerah No 2 tahun 2001

³⁰ Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 19 tahun 2001

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Khoirul tanggal 27 Mei 2014 pukul 10.10 di Bappeda Kabupaten Ngawi

pengembangan pada tempat-tempat wisata melalui program Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) yang mengutamakan pembangunan dan pemugaran objek-objek wisata Kabupaten Ngawi. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi wisata Kabupaten Ngawi sebagai persiapan *Visit East Java 2013*.

Sistem otonomi daerah membuka peluang daerah untuk lebih memaksimalkan potensi daerah. Kabupaten Ngawi juga berusaha untuk mengembangkan potensi wisata Kabupaten Ngawi, salah satu yang dilakukan adalah dengan bekerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan pemugaran dan perbaikan sarana prasarana objek wisata Pemandian Tawun. Kerjasama tersebut dilakukan antara pihak pemerintah Kabupaten Ngawi dan PT. Bukit Ketawang Indah selaku mitra bisnis dalam rehabilitasi dan pengembangan objek wisata Pemandian Tawun. Kerjasama tersebut sesuai dengan isi surat perjanjian No. 05/KTR/1991 tertanggal 18 Desember 1991, dalam surat perjanjian tersebut telah disepakati PT. Bukit Ketawang Indah selaku investor dan penerima tugas pengelola Pemandian Tawun selama dua puluh lima (25) tahun.

PT. Bukit Ketawang Indah dalam surat perjanjian No. 05/KTR/1991 tertanggal 18 Desember 1991 bertugas untuk membangun dan memugar beberapa sarana dan prasarana, dan pengelolaan Pemandian Tawun dengan jangka waktu dua puluh lima tahun terhitung sejak dibuat perjanjian.

Kebijakan Pemerintah Daerah Ngawi dalam hal pengembangan pariwisata Ngawi yang sebagian besar dimiliki oleh pihak swasta dilakukan dengan adanya pengenalan daerah tujuan wisata pada para wisatawan yang diwujudkan dengan pemberian *guide* untuk mengantarkan ke tempat wisata.³²

Selain mengajak kerjasama PT. Bukit Ketawang Indah, pihak kabupaten juga mengeluarkan beberapa Perda yang bertujuan untuk mengembangkan daerah tujuan wisata seperti dalam Perda No 22 tahun 2000, Kabupaten Ngawi untuk mengatur masalah retribusi masuk, retribusi parkir kendaraan bermotor untuk pengunjung tempat wisata.

Peraturan tentang retribusi diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 yang membahas tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Daerah. Berdasarkan peraturan nasional tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.

Penetapan peraturan daerah tentang retribusi selalu dipantau dan ditinjau kemudian disesuaikan dengan keadaan, seperti peninjauan terhadap peraturan daerah Kabupaten Ngawi No. 22 tahun 2000 yang diperbaiki dengan peraturan daerah Kabupaten Ngawi No. 29 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 22 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Kebijakan tentang retribusi yang terbaru adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Pada dasarnya

peninjauan ulang ini dilakukan untuk memperbaharui jumlah pungutan retribusi yang disesuaikan dengan jumlah nominal yang berlaku dan sesuai.

Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam pengembangan pariwisata adalah dengan bekerjasama dengan para pengelola pariwisata Kabupaten Ngawi dan pihak swasta lain, contohnya adalah sumbangan dari PT. Gudang Garam Indonesia Kediri, dan sumbangan dari pemerintah pusat Jakarta dalam pembangunan objek wisata religi Alas Srigati atau Alas Ketonggo sebagai salah satu wisata religi yang ada di Kabupaten Ngawi yang pengelolaannya masuk dalam Dinas Perhutani.

Dinas pariwisata dalam usaha pengembangan pariwisata Kabupaten Ngawi membentuk kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) di wisata Pemandian Tawun pada tahun 2011. Pembentukan kantor tersebut, merupakan salah satu wujud pengembangan pariwisata dengan memajukan pemeliharaan wisata Pemandian Tawun. Selain membentuk UPT di Pemandian Tawun, Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata juga mencanangkan Tahun Kunjungan Wisata Ngawi pada tahun 2012, dan berpartisipasi dalam Tahun Kunjungan Jawa Timur 2013 (*Visit East Java 2013*). Pelaksanaan tahun kunjungan juga menandai usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi untuk bebenah dan lebih menata pariwisata yang ada di Kabupaten Ngawi, mengingat banyaknya potensi wisata yang menarik untuk dikembangkan.

Rencana pengembangan pariwisata Kabupaten Ngawi salah satunya adalah Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) yang dimulai pelaksanaannya pada tahun 2010. Program RAKP berupaya mencari dan mengembangkan potensi-potensi wisata baru Kabupaten Ngawi dan melakukan perbaikan fasilitas tempat wisata, program ini fokus pada pengembangan pariwisata dan fasilitas-fasilitasnya. Program RAKP merupakan program kerja bersama pemerintah Kabupaten Ngawi. Pembangunan tersebut tidak hanya berpusat pada perbaikan kondisi objek wisata, namun juga melakukan pembangunan taman-taman kota untuk lebih mempercantik Kabupaten Ngawi. Pembangunan tempat wisata juga dibarengi dengan usaha pembangunan desa wisata dan pemajuan industri pariwisata seperti industri kerajinan batik khas Ngawi yang mulai dibangkitkan kembali produksinya. Industri cinderamata, dan industri kuliner, sebagai unsur kelengkapan dalam kegiatan pariwisata, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi yang dapat berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan kepariwisataan Kabupaten Ngawi secara nyata ditunjukkan dengan adanya realisasi pelaksanaan program sapta pesona untuk mendukung kebijakan retribusi, dan perencanaan penataan pariwisata yang telah digagas dan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi. Program Sapta Pesona merupakan salah satu tolak ukur peningkatan kualitas wisata suatu daerah. program sapta pesona terdiri

³² Hasil wawancara dengan Ibu Ninuk tanggal 20 Februari 2014 pukul 11.00 di kantor Dinas Pariwisata

dari (kemanan, kebersihan, ketertiban, kesejukan, keindahan, keramah tamahan, kenangan).

5. Sarana dan Prasarana

Pengadaan sarana prasarana pendukung kepariwisataan memang sangat penting, karena sarana prasarana adalah hal dasar atau kebutuhan dasar bagi para wisatawan. Pengadaan sarana dan prasarana dimulai dari akomodasi, transportasi, sarana jalan, restoran atau tempat makan, promosi pariwisata, fasilitas tempat wisata dan agen perjalanan yang bertujuan untuk memudahkan pengunjung saat melakukan perjalanan wisata. Keberadaan sarana dan prasarana merupakan hal yang penting yang harus dimiliki untuk mengembangkan pariwisata.

Sarana prasarana bagi para pengunjung seperti tempat makan dan penginapan umumnya tersedia di sekitar tempat wisata atau tempat yang mudah dijangkau oleh pengunjung, namun sarana dan prasarana ini juga tersedia di dekat kota. Salah satu pengembangan sarana kepariwisataan di Kabupaten Ngawi adalah dengan tersedianya sarana restoran yang representatif, murah dan mudah terjangkau. Berikut adalah nama dan alamat restoran yang ada di Kabupaten Ngawi, yang sering dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun nasional;

- RM Accord I beralamat di Jln. Dr. Wahidin 4 Ngawi
- RM Accord II beralamat di Ds. Nglarangan RT/RW 001/07 Karangasri Ngawi
- RM Duta I beralamat di Jln. Raya Ngawi - Solo Km 6
- RM Duta II beralamat di Jln. Raya Ngawi - Solo Km 4
- RM Kondang beralamat di Jln. Raya Ngawi - Solo Km 4
- RM Suminar beralamat di Jln. Basuki Rahmat (Raya Dungus)
- RM Ros-In beralamat di Jln. PB. Sudirman Ngawi
- RM Putra Jatim beralamat di Jln. Raya Ngawi - Solo Km 7.³³

Selain sarana prasarana restoran atau tempat makan, tersedia pula *travel agen* dan tempat penyewaan mobil bagi pengunjung. Hal ini juga mendapat perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Ngawi, mengingat ada beberapa lokasi wisata alam dan budaya di Kabupaten Ngawi yang terletak relatif jauh dari pusat kota dan tidak adanya sarana angkutan umum menuju ke tempat wisata tersebut. Pengunjung atau wisatawan bisa memilih agen travel atau persewaan mobil sebagai salah satu jalan keluar. Berikut adalah daftar agen perjalanan dan tempat persewaan mobil yang ada di Kabupaten Ngawi:

- Agen Perjalanan Rosalia Indah beralamat di Jln Hasanudin No. 1.
- Agen Perjalanan Surya Kencana beralamat di Jln Basuki Rahmat dan Jln. A. Yani.
- Rental Mobil Hexa Car Rental beralamat di Jln. PB Sudirman No. 12.

- Rental Mobil Wakeli United Car Rental beralamat di Jln. A. Yani.
- Travel Ros-In beralamat di Jln. PB Sudirman.³⁴

Hal lain yang juga sangat diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi adalah pengembangan sarana penginapan bagi para wisatawan, khususnya wisatawan luar daerah. Usaha penginapan atau Hotel telah banyak dikembangkan di Kabupaten Ngawi. Kebutuhan penginapan bagi wisatawan yang ingin menginap di Ngawi telah tersedia di beberapa tempat penginapan atau hotel, antara lain;

- Hotel Asri beralamat di Jln A. Yani No. 178
- Hotel Maksu beralamat di Jl Suryo No. 23
- Hotel Menanti beralamat di Jln Yos Sudarso No. 34
- Hotel Saa Nuansa beralamat di Jln Yos Sudarso No. 36
- Hotel Wahyu beralamat di Jln A Yani No. 92
- Hotel Wajar beralamat di Jln A. Yani No. 143.³⁵

Hotel-hotel di Kabupaten Ngawi letaknya berada di dekat pusat kota, jika digunakan untuk menginap wisatawan luar daerah yang ingin dekat dengan lokasi wisata akan sedikit sulit, karena harus menggunakan jasa transportasi atau jasa angkutan untuk menuju tempat wisata terlebih dahulu. Keadaan tersebut mendorong warga sekitar tempat wisata juga menyediakan *homestay* agar para wisatawan luar daerah agar tidak terlalu jauh untuk menjangkau tempat wisata yang diinginkan.³⁶

Kebutuhan wisatawan yang tidak kalah penting adalah ketersediaan cinderamata. Beberapa cinderamata khas yang tersedia di Kabupaten Ngawi antara lain, wisatawan dapat membeli kerajinan bonggol jati yang dijual oleh pengrajin yang terdiri dari masyarakat sekitar Desa Branjangan yang berada di Kecamatan Mantingan. Selain kerajinan bonggol jati wisatawan juga dapat membeli oleh-oleh berupa kain batik khas Kabupaten Ngawi yang mulai muncul ke permukaan dan berkembang kembali setelah pemerintah menggiatkan kampanye batik sebagai identitas nasional, pengrajin batik Ngawi mulai bermunculan kembali.

Cinderamata khas Ngawi juga dapat diperoleh wisatawan di area wisata seperti di area wisata Air Terjun Pengantin yang menyediakan oleh-oleh khas berupa gantungan kunci dan kaos bersablon yang dibuat oleh warga sekitar tempat wisata.³⁷ Cinderamata juga dapat diperoleh di Perkebunan Teh Jamus yang menyediakan oleh-oleh berupa teh kemasan yang dijual di beberapa kios di area wisata dengan harga yang terjangkau. Teh yang dijual terdiri dari dua jenis teh, yaitu teh untuk minuman atau teh konvensional dan teh fungsional yang

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Haryanto di Perkebunan Teh Jamus, tanggal 7 Juli 2014 pukul 12.30

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Trianto tanggal 11 Juli 2014 di area wisata Air Terjun Pengantin pukul 11.00

³³ Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi. 2013. *Buku Pariwisata dan Sejarah Ngawi Ramah*. Ngawi: Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Dinas Pariwisata halaman 50

dapat digunakan untuk obat.³⁸ Cinderamata yang tidak kalah menarik adalah Kain batik tulis khas Ngawi ini diproduksi oleh masyarakat Ngawi.³⁹ Kain batik tulis khas Ngawi juga tersedia di beberapa toko pakaian yang ada di Kabupaten Ngawi, toko-toko pakaian yang menjual batik antara lain;

- Batik Widi Nugraha beralamat di Desa Munggut RT/RW 01/01 Kecamatan Padas.
- Gerai Batik beralamat di Jl. Teuku Umar No. 18 Ngawi
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Perindustrian beralamat di Jl. P.B Sudirman Ngawi
- Batik Pringgodani beralamat di Desa Mojo Kecamatan Bringin
- Batik Suwandi beralamat di Desa Banyubiru Kecamatan Widodaren.⁴⁰

Wisatawan yang menginginkan wisata kuliner juga bisa mendatangi warung-warung makanan yang ada di Alun-Alun Kabupaten Ngawi.

Sarana prasarana pendukung tidak hanya dibuka di pusat kota, melainkan di sekitar tempat wisata juga dibuka warung makanan dan sarana kebutuhan penginapan untuk wisatawan yang disediakan oleh penduduk sekitar tempat wisata. Penduduk sekitar menyediakan jasa layanan akomodasi, transportasi, dan kebutuhan wisatawan lainnya. Keberadaan tempat wisata menjadi sumber penghasilan tersendiri bagi masyarakat sekitar tempat wisata, hubungan ini mengandung unsur *simbiosis mutualisme* dimana kedua pihak saling diuntungkan.

6. Perkembangan Prasarana

Prasarana menjadi dukungan penting untuk objek wisata, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai dapat lebih mengembangkan wisata menjadi lebih besar. Pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai serta wisata yang dapat diakses dengan mudah menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Wisatawan akan lebih memilih tempat wisata yang mudah diakses daripada yang sulit diakses.

Pengembangan sarana dan prasarana di kabupaten ngawi juga diperhatikan oleh Pemerintah Daerah agar objek wisata menjadi lebih berkembang. Perkembangan sarana dan prasarana yang dilakukan antara lain adalah melakukan perbaikan-perbaikan jalan, khususnya yang menjadi jalur menuju obyek wisata. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui program perbaikan jalan telah melakukan perbaikan dan juga pelebaran yang menuju ke berapa lokasi wisata seperti pengaspalan jalan menuju lokasi objek wisata Air Terjun Srambang (2000, 2012), jalan menuju Museum Trinil (2011), Waduk

Sangiran (2006), Waduk Pondok (2000), Perkebunan Teh Jamus (2006), dan Wisata Air Terjun Pengantin (2012) yang semula masih berupa jalan tanah. Proyek tersebut merupakan kerjasama dengan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP), hal tersebut dilakukan karena Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Kebersihan (Dinas PU BMCK) hanya bertanggung jawab terhadap pembangunan jalan yang ada di kota dan jalan yang menghubungkan kecamatan. Selain itu pembangunan dapat dilakukan melalui beberapa program yaitu; program Anggaran Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari kabupaten atau Provinsi, bantuan dana pusat, PIIP, dan PNPM-Mandiri.⁴¹

Pengembangan prasarana juga ditunjukkan dengan pembangunan kolam renang di Perkebunan Teh Jamus tahun 2005, penambahan atraksi wisata flying fox di Perkebunan Teh Jamus tahun 2007, pembangunan jembatan di Pemandian tawun tahun 2002, dan pembangunan taman di area wisata Museum Trinil tahun 2002 dan di area wisata Monumen Soeryo tahun 2011

Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai juga harus dilengkapi dengan adanya promosi yang tepat dan maksimal. Promosi wisata dilakukan dengan menambahkan papan petunjuk arah ke semua area wisata. Promosi lain dilakukan dengan mencetak buku pariwisata dan sejarah yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ngawi. Menunjuk Duta Wisata yang disebut Dimas dan Diajeng. Pemilihan Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi dilakukan setiap tahunnya, pemilihan ini diikuti oleh siswa-siswi yang dikirimkan oleh masing-masing Sekolah Menengah Atas (SMA/ sederajat) di Kabupaten Ngawi dengan berbagai kriteria salah satunya adalah berpenampilan menarik dan mampu mengenalkan potensi wisata Kabupaten Ngawi.

Pengenalan wisata Kabupaten Ngawi juga dilakukan dengan adanya pementasan kesenian tradisional berupa Tari Orek-orek yang ditampilkan untuk menyambut tamu-tamu dari luar daerah Kabupaten Ngawi. Penampilan Tari Orek-orek oleh para profesional hanya dilakukan ketika ada kunjungan dari luar daerah, tidak pernah dilakukan pagelaran atau semacamnya.⁴²

7. Penambahan objek wisata baru

Berdasarkan rencana *Visit Ngawi 2012*, pemerintah Kabupaten Ngawi membuat suatu kebijakan pengembangan pariwisata baik dengan menambah jumlah objek wisata yang ada atau pun memperbaiki fasilitas-fasilitas yang telah ada di tempat wisata. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 36 tahun 2011 tentang Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Pariwisata yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Sriyanto di pos penjagaan II Perkebunan Teh Jamus tanggal 7 Juli 2014 pukul 11.30

³⁹ Pemerintah daerah kabupaten Ngawi buku pariwisata dan sejarah Ngawi ramah halaman 27

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 52

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Hariyono di Dinas PU BMCK tanggal 12 Juni 2014 pukul 8.30

⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Ninuk di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Ngawi tanggal 11 Februari 2014 pukul 10.00

Kabupaten Ngawi sebagai langkah awal dalam persiapan pelaksanaan *Visit Ngawi 2012*, ditetapkan beberapa wisata baru yang dapat menjadi pilihan tujuan wisata pengunjung, antara lain;

- a. Air Terjun Jumok Hargomulyo atau lebih dikenal dengan Air Terjun Pengantin;
- b. Air Terjun Suwono Hargomulyo;
- c. Benteng Van Den Bosch atau Benteng Pendem
- d. Sumber Air Panas Ketanggung;
- e. Arca Banteng;
- f. Rumah dr. KRT. Radjiman Widjoningrat;
- g. Rumah Batu Hargomulyo;
- h. Air Terjun Selondo
- i. Taman bermain anak.

Pertambahan jumlah objek wisata Kabupaten Ngawi memang cukup signifikan, namun karena masih tergolong baru sebagian objek wisata belum begitu dikenal masyarakat sehingga belum terlalu banyak dikunjungi. Wisata baru tersebut masih dalam tahap pengembangan, sehingga kunjungan wisata masih belum terlalu banyak, pengembangan wisata Kabupaten Ngawi tersebut merupakan kerjasama antar Dinas dalam pemerintah daerah Kabupaten Ngawi beserta pihak swasta

8. Pengaruh Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Industri pariwisata memiliki banyak manfaat dan dampak, salah satu dampaknya adalah di bidang ekonomi.

Objek wisata kabupaten Ngawi terdiri dari objek wisata alam dan objek wisata budaya. Objek wisata budaya yang dimiliki kabupaten Ngawi yang digelar tiap tahun merupakan salah satu pagelaran akbar yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Ngawi tiap tahunnya. Kegiatan pariwisata budaya Kabupaten Ngawi yang merupakan kegiatan setiap tahun selalu menarik wisatawan lokal dalam jumlah yang besar, beberapa pagelaran wisata budaya tiap tahun yang digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Ngawi antara lain;

- a. Pagelaran pementasan wayang kulit yang dilakukan tiap tahun untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan pementasan wayang kulit yang diadakan untuk memperingati Hari Jadi atau Ulang Tahun Kota Ngawi yang diperingati setiap tanggal 7 Juli.
- b. Kegiatan Pawai Ria Pembangunan yang diikuti oleh sekolah-sekolah yang ada di kecamatan Ngawi mulai dari SD sampai perguruan tinggi untuk menyemarakkan Peringatan Kemerdekaan Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus.
- c. Kegiatan pawai kendaraan hias yang dilakukan tiap tahun untuk menyemarakkan Peringatan Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus.
- d. Pagelaran konser dangdut, atau warna musik lain sebagai acara penyambutan tahun baru.

- e. Kegiatan pasar malam yang berpusat di Alun-alun Kabupaten Ngawi yang diselenggarakan untuk lebih menyemarakkan acara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Beberapa acara diatas selalu dapat menarik banyak wisatawan lokal dari wilayah Kabupaten Ngawi. Banyaknya wisatawan lokal yang datang berkumpul untuk melihat pagelaran atau kegiatan diatas memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dan beberapa pihak masyarakat, antara lain untuk para penjual makanan yang ada di Alun-alun, penjual-penjual dadakan yang berkumpul karena ada acara atau *event*, masyarakat sekitar yang mengelola parkir tambahan, dan pemerintah daerah yang mendapatkan tambahan pendapatan dari pungutan retribusi penjual yang berdagang di pasar malam dan pungutan retribusi parkir yang sebagian bertempat di halaman kantor bupati Ngawi.

Peraturan tentang retribusi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 22 tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang diperbaharui dengan dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 29 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 22 tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 29 tahun 2002 kemudian diperbaharui kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 2 tahun 2011. Peraturan ini memuat tentang besaran retribusi yang dibebankan untuk pengadaan acara atau *event* yang digelar di tempat wisata. Berikut tabel besaran tariff retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabapten Ngawi.

Tabel besaran tariff retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Kabapten Ngawi

Aspek	Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2000	Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2002	Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2011
Tanda masuk untuk orang dewasa	Rp 1.000,-	Rp 1.000	Rp 5.000
Tanda masuk untuk orang anak-anak	Rp 500,-	Rp 500	Rp 5.000
Parkir kendaraan jenis truk dan bus	Rp 2.000,-	Rp 2.000	Rp 4.000
Parkir kendaraan roda 4 (empat) selain bus dan truk	Rp 1.000,-	Rp 1.000	Rp 5.000
Parkir kendaraan roda 2 (dua)	Rp 500,-	Rp 500	Rp 1.000
Fasilitas kamar kecil atau toilet	Rp 300,-	Rp 500	Rp 1.000
Fasilitas kios wisata	Rp 1.000,-	Rp 2.000	Rp 2.000
Fasilitas gedung	-	Rp 50.000	Rp

pertemuan			100.000
Pertunjukan di lapangan terbuka dengan memungut biaya dari penonton	Rp 50.000	Rp 200.000	Rp 800.000
Pertunjukan di lapangan terbuka dengan tidak memungut biaya dari penonton	-	Rp 100.000	Rp 400.000
Pertunjukan di lapangan tertutup dengan memungut biaya dari penonton	-	Rp 400.000	-
Pertunjukan di lapangan tertutup dengan tidak memungut biaya dari penonton	-	Rp 200.000	-
Stan pameran dan kios dalam pertunjukan atau pasar malam setiap 1 m ²	Rp 500,-	Rp 500	Rp 3.000

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi

Berdasarkan data tersebut di atas secara keseluruhan dapat dijelaskan besaran kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngawi setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

Tabel kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Tahun	Target (dalam rupiah Rp)	Realisasi (dalam rupiah Rp)
2000	35.435.000	33.453.000
2001	40.730.350	31.450.000
2002	45.055.000	46.080.500
2003	47.770.700	38.650.000
2004	52.320.000	49.835.000
2005	58.758.000	53.450.000
2006	63.454.000	61.340.400
2007	75.632.000	57.755.000
2008	85.435.000	76.430.000
2009	98.602.000	82.603.000
2010	119.980.000	99.964.000
2011	220.104.000	190.503.510
2012	259.551.000	263.520.000
2013	257.412.000	242.130.000

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa, sektor pariwisata di Kabupaten Ngawi mempunyai kontribusi yang cukup banyak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi sektor pariwisata pada tahun 2000 menyumbang sebesar Rp 33.453.000,- untuk PAD kab. Ngawi, pada tahun 2002 retribusi pendapatan pariwisata meningkat menjadi Rp

46.080.500,- dan melebihi target yang direncanakan. Sumbangan dari tahun ke tahun terus bertambah, seperti sumbangan dari tahun 2006 sebesar Rp 61.340.400,-. Sumbangan pariwisata terhadap PAD pada tahun 2007 sedikit penurunan terkait dengan adanya bencana alam banjir yang melanda Kabupaten Ngawi, sumbangan menurun menjadi Rp 57.755.000,- keadaan tersebut tidak bertahan lama, pada tahun 2008 sektor pariwisata telah mengalami peningkatan kembali dengan menyumbang sebesar Rp 76.430.000,-. Sumbangan yang terbesar adalah sumbangan yang berasal dari tahun 2012 yaitu sebesar Rp 263.520.000 yang bertepatan dengan Tahun Kunjungan Wisata Ngawi (*Visit Ngawi 2012*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata apabila dikelola dengan baik akan dapat meningkatkan sumbangan terhadap PAD, oleh karena itu kebijakan pemerintahan daerah yang peduli terhadap sektor pariwisata perlu ditingkatkan

Kegiatan pariwisata bermanfaat bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah sekitar tempat wisata, masyarakat sekitar dapat mendapatkan pekerjaan baru berupa berdagang di daerah sekitar tempat wisata. Hal tersebut juga terjadi di beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Ngawi, bahkan penduduk sekitar yang ada di sekitar kawasan wisata religi Srigati memutuskan pindah ke kawasan tempat wisata yang terletak pada tengah hutan. Banyak warga sekitar desa yang berbatasan langsung dengan kawasan wisata religi Srigati yang membuka usaha warung makan untuk menambah penghasilan. Dari data yang diperoleh melalui observasi di lapangan terdapat sekitar tujuh warung makan yang terdapat dalam area wisata religi Srigati. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bei warga sekitar mulai pindah ke kawasan wisata religi Srigati pada tahun 1990-an.⁴³

Menurut pengakuan Ibu Sri sebagai salah satu pedagang makanan dan alat ritual di Pesanggrahan Srigati yang telah berdagang sejak tahun 1989 pendapatan dari hasil berjualan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan penuturan Ibu Sri, sekitar tahun 2000-2013 penghasilan mereka pada saat pengunjung tidak terlalu banyak, atau pada bulan-bulan biasa, bukan bulan Suro atau Muharram pendapatan Ibu Sri dapat mencapai minimal Rp 1.500.000 per bulan. Pendapatan tersebut akan mengalami peningkatan yang besar ketika bulan Muharram. Menurut penuturan Ibu Sri, pendapatan Ibu Sri pada bulan Muharam akan meningkat tajam yaitu minimal Rp 700.000,- per malam.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Suyati yang membuka usaha warung makanan dan jajanan di Pemandian Tawun memperoleh hasil sekitar Rp 200.000,- per minggu.⁴⁵ Menurut Ibu Sabar yang berjualan makanan dan jajanan di Waduk Pondok, menjelaskan bahwa dari kegiatannya membuka warung, ia memperoleh penghasilan sebesar Rp 400.000,- per

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Bei tanggal 16 juni 2014 di area wisata religi Srigati

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Sri di area Pesanggrahan Srigati tanggal 2 Juli 2014

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Suyati di area wisata Pemandian Tawun tanggal 16 Juli 2014 pukul 12.30

Minggu, dan saat ramai dapat mencapai Rp 700.000,-.⁴⁶ Menurut pengakuan Ibu Karno yang membuka warung di area sekitar objek wisata Waduk Sangiran dalam sebulan, pendapatan yang didapat dari membuka warung adalah sebesar Rp 700.000,-.⁴⁷ Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Siman yang berjualan mie rebus, minuman, dan jajanan di area wisata Air Terjun Srambang mengaku dalam seminggu dapat mengantongi penghasilan warung sebesar Rp 50.000,- per hari, dan ketika ramai seperti hari libur pendapatan Bapak Siman meningkat menjadi Rp 150.000,- per hari.⁴⁸ Sedangkan menurut pengakuan Ibu Haryanto yang membuka warung di area wisata Perkebunan Teh Jamus dalam seminggu ketika hari sepi dapat mencapai Rp 500.000,-, dan saat libur lebaran dalam sehari Ibu Haryanto mendapat penghasilan sebesar Rp 700.000,-.⁴⁹ Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ternyata sumbangan sektor pariwisata alam yang ada di Kabupaten Ngawi cukup besar bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar dengan usaha membuka warung makanan dan jajanan serta minuman.

Selain usaha menjual makanan, masyarakat sekitar biasanya membuka usaha jasa parkir swasta (milik penduduk), usaha ini bisa ditemui di kawasan wisata Air Terjun Srambang, yang di pungut biaya sebesar Rp 1.000,- namun tempat parkir yang dibuka oleh warga ini jaraknya terlalu jauh dari area Air Terjun pengantin sehingga kurang begitu diminati.⁵⁰ Usaha parkir swasta juga terdapat di area wisata pemandian Tawun, menurut hasil wawancara dengan Bapak Santo yang membuka jasa parkir swasta di Pemandian Tawun mengaku dalam seminggu pendapatannya dapat mencapai sebesar Rp 250.000,- per minggu.⁵¹

Hal yang menarik ditemui di Waduk Pondok dan Sangiran, di kedua tempat obyek wisata alam tersebut masyarakat sekitar dapat memperoleh penghasilan yang cukup besar dari usaha menyewakan perahu untuk kegiatan memancing para pengunjung wisata yang juga penggemar memancing. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sardi, seorang pemilik perahu yang perahunya sering disewa pemancing mengatakan, bahwa tarif untuk sewa perahu rata-rata sebesar Rp.75.000 sampai Rp.150.000 per malam. Hal itu belum termasuk retribusi karcis masuk untuk para pemancing, sebesar Rp.5.000 pada siang hari dan Rp.10.000 pada siang hari di Waduk Pondok dan Waduk Sangiran. Menurut pengakuan Bapak Sabar sebagai salah satu pengelola warung apung yang menarik retribusi bagi para pemancing di wisata Waduk Pondok dalam

seminggu dapat mengantongi penghasilan sebesar Rp 500.000,-.⁵² Selain menarik retribusi untuk para pemancing, masyarakat sekitar juga menyewakan alat memancing, yaitu Rp 5.000 per hari.⁵³ Di area wisata Waduk Sangiran Ibu Karno membuka usaha toko pakan ikan dan alat memancing, dalam sebulan Ibu Karno mengaku dapat mengantongi penghasilan sebesar Rp 650.000.⁵⁴ Adanya berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat sekitar tempat wisata dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat, selain itu dapat memenuhi kebutuhan wisatawan yang datang ke area wisata. Hal ini membuktikan keberadaan tempat wisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Kegiatan pariwisata tidak hanya membawa dampak positif, kegiatan pariwisata juga membawa dampak negatif, dampak negatif yang dapat ditimbulkan pengunjung yang tidak bertanggung jawab antara lain; Banyaknya pengunjung dapat mengakibatkan kebersihan tempat wisata menjadi menurun, meskipun telah disediakan tempat sampah biasanya tidak semua pengunjung peduli akan kebersihan lingkungan.

Kondisi bangunan dan fasilitas tempat wisata juga bergantung pada pengunjung. Tidak sedikit pengunjung yang kurang bertanggung jawab mencoret-coret bangunan yang ada di tempat wisata dan merusak fasilitas, dengan keadaan tersebut, investor dan pengelola objek wisata dapat menderita kerugian akibat perbuatan tsb. Kondisi objek wisata yang rusak atau kotor dapat mengurangi jumlah kunjungan yang mengakibatkan menurunnya jumlah pengunjung yang berbuntut pada kerugian investor atau pengelola.

C. Penutup

Pariwisata Kabupaten Ngawi memiliki objek wisata alam dan wisata budaya yang menarik dan berpotensi untuk dikembangkan. Untuk lebih memaksimalkan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi Pemerintah Kabupaten Ngawi mengeluarkan beberapa kebijakan. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti akomodasi, restoran, transportasi, dan perbaikan akses jalan desa maupun menuju tempat wisata. Pengembangan objek wisata dan fasilitasnya, pembukaan wisata baru. Pengembangan lain yang dilakukan adalah pengembangan fasilitas pendukung di sekitar objek wisata.

Pariwisata memiliki beberapa dampak, salah satunya adalah dampak ekonomi, dampak ekonomi pelaksanaan pariwisata ngawi dapat dilihat dari adanya peningkatan PAD yang berasal dari adanya pemungutan retribusi di tempat wisata, pemungutan retribusi untuk pengadaan acara atau *event* di tempat wisata. Pariwisata juga berperan penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat sekitar objek wisata. Kegiatan pariwisata juga

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Sabar di area wisata Waduk Pondok tanggal 5 Juli 2014 pukul 11.30

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Karno di area sekitar Waduk Sangiran tanggal 5 Juli 2014 pukul 14.00

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Siman di area wisata Air Terjun Srambang tanggal 11 Juli 2014 pukul 13.30

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Haryanto di objek wisata Perkebunan Teh Jamus tanggal 7 Juli 2014 pukul 13.00

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Siman di area wisata Air Terjun Srambang tanggal 11 Juli 2014 pukul 13.30

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Santo di area wisata Tawun tanggal 16 Juli 2014 pukul 15.00

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Sabar di area wisata Waduk Pondok tanggal 5 Juli 2014 pukul 12.30

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Karno di area wisata Waduk Sangiran tanggal 5 Juli 2014 pukul 13.40

membawa dampak negatif, antara lain kerusakan fasilitas objek wisata, menurunnya kebersihan yang dapat menyebabkan kerugian pada pengelola dan investor.

Daftar Pustaka

A. Arsip/Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan
 Surat Perjanjian Kerjasama Pemabangunan Pemugaran Taman Rekreasi Tawun No 05/KTR/1991
 Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2000 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur
 Peraturan Pemerintah Daerah No 2 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005
 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No 22 Tahun 2000 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 19 Tahun 2001 Rencana Strategis Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2001-2005
 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No 29 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No 22 Tahun 2000
 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 02 Tahun 2011
 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi No. 29 Tahun 2002
 Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

B. Buku

- Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press
 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga. 2013. *Buku Pariwisata dan Sejarah Ngawi Ramah*. Ngawi: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga
 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ngawi. 2012. *Pesona Wisata Kabupaten Ngawi*. Ngawi: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
 Donald, E Lunderberg, Mink H. Stavenga, M. Khrisnamoorthy. 1997. *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta : Gramedia

- Gamal Suwanto. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
 Hadi Setya Tunggal.1999. *Peraturan Perundang-Undangan Kepariwisataan Indonesia*. Jakarta : Havarindo
 H.Kodhyat. 1996. *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta:Grasindo
 I Gde Pitana, I Ketut Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*.Yogyakarta: Andi
 Moch Enoh.1996. *Geografi Pariwisata*. Surabaya : Unesa University Press
 Nurlan Darise. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gorontalo: Indeks
 Nyoman S. Pendit. 1994. *Ilmu Pariwisata, Sejarah Pengantar Pertama*. Jakarta : Pradnya Paramita
 Oka A. Yoeti. 1982. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa
 _____. 1985. *Komersialisasi Seni Budaya dalam Pariwisata*. Bandung : Angkasa
 _____. 1989. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Bandung: Angkasa
 R.G. Soekadjo. 1995. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta : Gramedia
 Salah Wahab. 1992. *Manajemen Kepariwisataan*. Jakarta : Pt Pradnya Paramita
 Spillane, James J.1994. *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Jogjakarta: Kanisius

C. Sumber Internet

- www.kamusbesarbahasaindonesia.org diakses pada 10 April 2014 Pukul 20.08